



ISU PEREMPUAN SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KAMPANYE CALON DALAM PILKADA

Waluyo Handoko *)

*) Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Abstract: *The role of women in development up to now has not been maximally played although reformation era has opened the space for women to actively participate. Related to pilkada (local election), women empowerment should be considered as an interesting and important issue for campaign. However, based on the cases elaborated in this research, most candidates did not take into account women empowerment programs as political communication strategy in campaign. There are two reasons which can logically explain this phenomenon; first, women empowerment issue was not considered as important as other issues which can directly answer the crucial social problems such as poverty alleviation, providing job opportunities for unemployment or dealing with expensive fee for education so that not effective to attract the voters. Second, there was an assumption that sex does not have significant relation with political choice of voters. It means female voters do not always vote for female candidates or candidates focusing on women empowerment programs. Finally, issues related to women role improvement were not much included in campaign materials of either male or female candidates to catch the attention of voters. **Keywords:** women empowerment issue, political communication.*

A. PENDAHULUAN

Berbagai kelemahan dalam praktek pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD sekaligus tuntutan diselenggarakannya demokrasi langsung dalam suksesi kepemimpinan nasional, mendorong ditetapkan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pertama yang Dipilih Langsung oleh Rakyat. Selanjutnya, sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999, ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mengatur model pilkada langsung oleh rakyat (pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004), setelah sebelumnya ditetapkan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, di mana DPRD tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pilkada.

Idealnya, pilkada langsung akan memperkuat demokratisasi di daerah karena dengan kontrol dan keterlibatan konstituen yang lebih besar. Hal ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerahnya. Namun, rangkaian penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah dilaksanakan di sejumlah daerah menyisakan berbagai macam persoalan. Sosialisasi yang kurang maksimal, relatif tingginya angka golput, sampai pada visi misi kandidat yang belum sepenuhnya sampai ke masyarakat.

Munculnya sejumlah persoalan tersebut sudah seharusnya diantisipasi oleh calon-calon yang maju dalam pilkada. Berbagai isu pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan sebagainya –termasuk isu tentang perempuan– muncul sebagai strategi komunikasi politik untuk menarik suara pemilih dalam kampanye. Untuk itu, tulisan ini mencoba melihat sejauh mana isu pemberdayaan perempuan menjadi materi visi misi calon dalam pilkada yang mendukung perolehan suara calon tersebut.

B. PEMBAHASAN



Pertanyaan awal tulisan ini, mengapa perempuan? Sebagaimana diketahui jumlah perempuan di negeri ini relatif lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Era reformasi juga telah memberi ruang lebih luas bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Komitmen pemerintah yang tercermin dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas. UU tersebut secara eksplisit telah menjelaskan tujuan pembangunan yang harus juga mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (KKG), yang berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan. Untuk mendukung implementasi di tingkat daerah, telah lahir pula Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meskipun demikian, peran perempuan di sektor publik sejauh ini masih belum maksimal. Kaum perempuan juga masih mengalami ketertinggalan dalam berperan aktif dalam pembangunan dibanding kaum laki-laki.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, pemanfaatan isu pemberdayaan perempuan seyogyanya menjadi menarik dan penting untuk menjadi visi misi calon, sebagai bentuk komunikasi politik kandidat yang berlaga dalam pilkada, baik pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan bupati (pilbup). Namun demikian, dari sejumlah pilkada yang sudah berlangsung, ternyata hanya sedikit kandidat—baik calon laki-laki maupun perempuan—yang mengangkat persoalan perempuan. Isu pemajuan perempuan kurang menjadi fokus sebagai pesan politik yang disampaikan untuk menarik suara pemilih, baik oleh kandidat laki-laki maupun perempuan sendiri. Demikian juga segmen pemilih yang dituju, hal itu masih kurang memperhatikan secara khusus apakah tertuju pada pemilih perempuan atau laki-laki. Beberapa contoh berikut setidaknya menunjukkan hal tersebut.

Pilbup Kab. Banyumas 2008 diikuti oleh empat pasangan calon, Mardjoko-A.Husein, Singgih-Laily, Bambang P.-Tossy A., Aris W.-Asroru. Dari keempat pasangan tersebut, hanya Aris W.-Asroru yang secara eksplisit mencantumkan visi khusus perempuan, yaitu program pemberdayaan peranan wanita dan generasi muda. Sementara itu, calon wakil bupati Laily sudah menempatkan diri sebagai “ibu” orang Banyumas—berpasangan dengan Singgih sebagai calon bupati—mengusung jargon “*rama biyunge wong Banyumas*” (bapak ibu dari orang Banyumas), namun Singgih-Laily tidak berhasil menuai hasil maksimal. Pasangan Singgih-Laily menduduki peringkat ketiga (23,6 persen), sementara Aris W.-Asroru menempati peringkat terbawah (10,9 persen).

Selanjutnya, dapat dilihat pada Pilgub Jateng 2008 yang diikuti oleh lima pasangan calon, Bambang S.-M. Adnan, Agus S.-A. Kholiq, Sukawi-Sudharto, Bibit-Rustriningsih, serta A. Tamzil-A. Rozaq. Dari kelimanya, hanya A. Tamzil dan A. Rozaq yang mencantumkan isu pemajuan perempuan, melalui program pengembangan olahraga, pemuda dan perempuan. Sementara itu, meskipun menjadi satu-satunya pasangan yang ada wakil perempuannya, pasangan Bibit-Rustriningsih justru lebih mengusung program umum, yaitu pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan (www.pilkadajateng2008.htm).

Mengacu pada teori komunikasi politik (Lord Windlesham, 1992; Dan Nimmo, 2000) visi misi yang diusung oleh kandidat dalam pilkada senyatanya merupakan bentuk komunikasi politik yang dikemas dalam kampanye. Di dalamnya terdapat kandidat dan tim sukses sebagai komunikator, pesan politik, persuasi untuk mendukung keinginan yang dimaksudkan, media penyampaian, massa, serta dampak-dampak akibat komunikasi politik. Proses penyampaian dilakukan secara sengaja oleh para kandidat dan tim suksesnya sebagai komunikator. Materi kampanye merupakan pesan politik yang dikonstruksikan



melalui berbagai macam program. Melalui media kampanye, diharapkan suara pemilih akan terserap dan terwujud dalam perolehan suara dalam pilkada yang menjadi dampak komunikasi politik yang diinginkan.

Berkaitan dengan program perempuan di atas, tampak penyampaiannya hanya menjadi “bagian kecil” dari keseluruhan visi misi yang diangkat oleh para kandidat dalam pilbup ataupun pilgub. Artinya, isu tersebut terlihat masih kalah gaungnya dibanding dengan isu kampanye lain, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan sebagainya, bahkan bagi kampanye calon yang sebenarnya secara eksplisit sudah memasukkan isu perempuan sekalipun. Kampanye Aris W.-Asroru dalam Pilbup Banyumas 2008 misalnya, meskipun program pemberdayaan wanita dan generasi muda tercantum sebagai salah satu visi misi pasangan tersebut, namun penyampaiannya terasa kurang mengena di masyarakat karena yang lebih sering dimunculkan kepada khalayak melalui berbagai media kampanye adalah program pendidikan gratis, pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) gratis, akta kelahiran gratis, serta pengobatan gratis bagi warga miskin.

Pertanyaan berikutnya, mengapa isu pemberdayaan perempuan kurang begitu diangkat menjadi materi kampanye untuk menarik suara pemilih dalam pilkada? Berikut disampaikan beberapa hal untuk didiskusikan. *Pertama*, isu tentang persoalan perempuan dalam kampanye mungkin dianggap kurang efektif untuk menarik suara pemilih, bahkan bagi pemilih perempuan sekalipun. Dalam kasus Pilbup Banyumas 2008, kemenangan diraih oleh pasangan Marjoko-A. Husein dengan perolehan suara 36,3 persen atau 321.106 dari 883.503 suara (*Radar Banyumas*, 23 Februari 2008). Dalam program kampanyenya, pasangan tersebut berjanji untuk mengatasi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, mengatasi pendidikan yang mahal dan kesejahteraan bagi seluruh warga Banyumas (*Radar Banyumas*, 6 Februari 2008).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed,¹ masalah-masalah sosial politik yang paling penting untuk diselesaikan oleh bupati dan wakil bupati jika terpilih nantinya adalah persoalan pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, yang dipilih oleh 76 persen responden; biaya pendidikan, yang dipilih oleh 69 persen; kemiskinan, dipilih oleh 55 persen dan biaya kesehatan yang dipilih oleh 35 persen responden. Artinya, keempat persoalan tersebut menjadi harapan bagi masyarakat Banyumas kepada bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk ditangani dan diselesaikan dengan baik.

Secara teoretik, apa yang menjadi program yang diusung oleh pasangan Marjoko–A.Husein di atas, keempatnya merupakan pesan politik yang disampaikan kepada khalayak sebagai bentuk komunikasi pasangan tersebut dengan masyarakat. Proses penyampaian pesan tersebut ternyata selaras dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat Banyumas saat itu. Hal itu tercermin pada harapan masyarakat terhadap masalah sosial politik yang paling penting untuk diselesaikan oleh bupati mereka, yaitu persoalan pengangguran, kemiskinan, biaya pendidikan dan kesehatan.

Berkaitan dengan efektif atau tidaknya isu perempuan yang dimaksudkan tulisan ini, survei tersebut dengan kata lain juga menjawab bahwa isu pemberdayaan perempuan bukan menjadi persoalan paling penting di masyarakat yang harus ditangani dan diselesaikan oleh pemimpin. Isu kemiskinan dan sejenisnya jauh dianggap lebih krusial menjadi persoalan di tengah masyarakat untuk segera dicari pemecahannya. Dari sudut pandang ini, setidaknya dapat menjawab bahwa isu perempuan kurang diangkat menjadi pesan politik para kandidat dalam pilkada karena isu tersebut memang dianggap kurang efektif untuk menarik suara pemilih. Penyebabnya adalah adanya anggapan kurang relevan dengan persoalan sosial politik yang paling penting untuk diselesaikan di masyarakat.



Kedua, anggapan tidak adanya korelasi yang signifikan antara jenis kelamin (dalam hal ini perempuan) dengan pilihan politik pemilih. Studi yang dilakukan oleh Austin Ranney (1999: 119-120) mencatat tidak ada pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan politik seseorang. Studi yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (2007) juga menyimpulkan dalam kasus Pilkada Banten 2006, kemenangan yang dicapai Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur lebih dikarenakan popularitas dan dukungan yang merata di semua lapisan masyarakat Banten (*Kajian Bulanan LSI*, 1 Mei 2007: 19).² Studi tersebut menyimpulkan tidak ada perbedaan di antara pemilih laki-laki ataupun perempuan dalam menentukan kandidat yang dipilih. Padahal, jumlah pemilih perempuan di wilayah tersebut separuh dari 7.958.948 pemilih yang ada. Demikian juga dalam Pilgub Jateng 2008. Kemenangan yang diraih oleh Bibit W.-Rustriningsih, sebagai satu-satunya pasangan yang ada wakil perempuannya, lebih dimungkinkan karena faktor dukungan mesin politik PDIP sebagai partai yang mencalonkan yang telah bekerja dengan baik ditunjang dengan basis massa PDIP yang memang kuat di wilayah Jateng. Dengan demikian, Rustriningsih mungkin lebih dipilih karena keberadaannya sebagai figur kader PDIP yang loyal dan kurang dilihat karena posisinya sebagai satu-satunya wakil perempuan dalam laga pilgub tersebut.

Survei yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed juga mencatat bahwa tingkat preferensi pemilih perempuan terhadap kandidat bupati dan wakil bupati memang menyebar. Artinya, tidak semua pemilih perempuan memberikan suaranya terhadap kandidat perempuan. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pilihan terhadap pasangan calon berdasarkan jenis kelamin adalah: Marjoko-A. Husein dipilih oleh 11,5 persen laki-laki dan 11,3 persen perempuan; Singgih-Laily dipilih oleh 7,2 persen laki-laki dan 10,7 persen perempuan; Bambang P-Tossy A. dipilih 8,6 persen dan 7,0 persen perempuan; dan Aris W.-Asroru dipilih 5,6 persen laki-laki dan 6,7 persen perempuan. Sementara itu, mereka yang tidak menjawab sebanyak 15,8 persen laki-laki dan 15,5 persen perempuan. Meskipun pasangan Singgih W.-Laily dipilih oleh lebih banyak pemilih perempuan dibanding laki-laki (10,7 persen dibanding 7,2 persen), namun pasangan Aris W.-Asroru juga lebih dipilih oleh pemilih perempuan, preferensi pemilih perempuan terhadap pasangan Marjoko-A. Husein dan Bambang P.-Tossy juga relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pemilih maupun kandidat terhadap pilihan politik pemilih.

Kasus di atas bisa terjadi karena kurangnya pengemasan isu pemberdayaan perempuan dalam paket visi misi yang disampaikan dalam kampanye para calon dalam pilkada berkaitan dengan hal tersebut. Artinya, belum tentu dengan jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak, maka akan menjadi jaminan mereka akan memilih kandidat yang perempuan, atau kandidat yang secara khusus membidik isu pemajuan perempuan. Akhirnya, hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu perempuan pun kurang menjadi fokus dalam materi kampanye. Bahkan, walaupun terdapat kandidat perempuan, namun tetap saja tidak mengusung secara khusus isu-isu perempuan, seperti yang terjadi juga dalam pilkada di Kab. Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Ambon dan Kab. Cianjur (*Kajian Bulanan LSI*, 1 Mei 2007 : 12-13). Isu-isu mengenai perempuan tidak diangkat sebagai pesan komunikasi politik dalam pemaparan visi mereka. Para kandidat lebih mengangkat tema-tema umum seperti kemiskinan, pendidikan ataupun kesehatan.

C. KESIMPULAN



Era reformasi telah memberi ruang yang lebih luas bagi peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, isu tentang pemajuan perempuan seyogyanya menjadi menarik dan penting untuk diangkat sebagai media komunikasi politik kepada masyarakat, dalam bentuk visi misi yang diusung kandidat. Namun demikian, dari beberapa contoh kasus pilkada yang dikemukakan di depan, isu kampanye yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan ternyata kurang diangkat sebagai strategi komunikasi politik utama, baik oleh kandidat laki-laki maupun oleh kandidat perempuan sendiri.

Terdapat beberapa hal yang diulas dalam tulisan ini untuk mencari penjelasan mengapa isu perempuan kurang dimasukkan sebagai materi kampanye: *Pertama*, isu tentang pemajuan perempuan dianggap kurang mengena dengan permasalahan kemasyarakatan lain yang dianggap lebih signifikan seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan isu-isu lain yang sejenis sehingga kurang efektif untuk menarik suara pemilih. *Kedua*, pemahaman tentang tidak ada pengaruh signifikan antara jenis kelamin seorang pemilih dengan pilihan politik seseorang, baik perempuan atau pun laki-laki. Artinya, belum tentu perempuan akan memilih kandidat perempuan dan isu yang berkaitan dengannya. Akhirnya, isu yang berhubungan dengan persoalan perempuan pun kurang dimasukkan dalam materi kampanye.

Terakhir, tulisan ini memberi sedikit masukan bahwa permasalahan pemajuan perempuan adalah masalah yang penting untuk ditangani dan diselesaikan, demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di negeri ini. Pilkada, sebagai manifestasi demokrasi di tingkat lokal, setidaknya dapat menjadi salah satu media penyadaran bahwa persoalan ketertinggalan perempuan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk diselesaikan.

ENDNOTE

¹ Survei dilakukan pada bulan Desember 2007 menjelang pelaksanaan pilbup langsung Kab. Banyumas bulan Februari 2008. Survei dilakukan di 27 kecamatan di seluruh kabupaten, dengan menggunakan *multi stage random sampling*, dengan melibatkan 400 orang responden dan memiliki toleransi kesalahan *margin of error* sebesar $\pm 5\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.

² Ratu Atut Chosiyah merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia yang terpilih melalui pilkada langsung. Keikutsertaan Ratu Atut Chosiyah dalam Pilkada Banten ini juga menjadi satu-satunya wakil perempuan yang berlaga sebagai kandidat gubernur pada level pilgub. *Kajian Bulanan LSI* (Edisi 1 Mei 2007) mencatat dari 296 pilkada di Indonesia, hanya 61 wilayah (20,6%) saja yang diikuti oleh kandidat perempuan. Selebihnya (79,4%), pilkada berlangsung tanpa kehadiran kandidat perempuan. Terdapat 69 orang perempuan yang ikut berpartisipasi sebagai kandidat dalam pilkada tersebut. Perinciannya, 19 orang (27,5%) maju sebagai kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) (1 pilgub dan 18 pilbup) dan selebihnya 50 orang (72,5%) maju sebagai wakil kepala daerah. Sementara dari 18 perempuan yang mencalonkan diri menjadi bupati/walikota, hanya 5 orang atau 27,8% yang berhasil lolos.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*. Jakarta: CIDA-Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-WSP II.
- Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*, Edisi 1 Mei 2007.
- Nimmo, Dan, 2000. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Radar Banyumas*, 25 Januari 2008.
- Radar Banyumas*, 6 Februari 2008.
- Radar Banyumas*, 23 Februari 2008.
- Ranney, Austin. 1999. *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Survei Tahap III Pilkada Kabupaten Banyumas*, Laboratorium Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed, Purwokerto 2008.
- UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- www.pilkadajateng2008.htm